



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUGROHO DWI PRASETIO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 693260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 745.000.000

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 1.206 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/210 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 42.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HADIAH Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 176.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.884.049

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.044.734.049

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.044.734.049



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.